

Mengurai Identitas dalam Konteks Regionalisme Kawasan Afrika: Perjuangan Melawan Apartheid Menuju Persatuan yang Solid

Galuh Anissa Sekar Ayu

Departemen Politik Pemerintahan dan Hubungan Internasional,
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Brawijaya

Email: galuhskaro4@student.ub.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze regionalism in the African Region in the dimension of socio-cultural aspects. Through this exploration, the author will explain the regional integration process by elaborating on regionalism, analyzing the background of Apartheid practices, the relationship between regionalism, norms, and identity, as well as the manifestations of the Pan-African movement through the regional institutions of the Organization of African Unity and the African Union. As an analytical tool, the author employs the New Regionalism Approach (NRA) with a qualitative descriptive research method. The research findings indicate that identity, norms, values, and principles play a role as intangible forces, while political practices and exploitation act as tangible forces in the process of regionalism in the African Region. Regionalism in the African Region, based on social aspects, is influenced by both internal factors and external factors. Through the new regionalism approach, the role of non-state actors shaping regionalism in the region is evident. Finally, the dynamic global political stage also demands a shift in direction for the OAU amid the challenges of the times.

Keywords: regionalism; apartheid; new regionalism approach; Africa; socio-cultural

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regionalisme di Kawasan Afrika dalam dimensi sosial budaya. Melalui eksplorasi tersebut, penulis akan menjelaskan proses integrasi kawasan melalui penjabaran regionalisme, analisis latar belakang praktik Apartheid, hubungan antara regionalisme, norma, dan identitas, serta manifestasi gerakan pan-Africanisme melalui institusi regional Organization of African Unity dan African Union. Sebagai alat analisis, penulis menggunakan pendekatan regionalisme baru (new regionalism approach/NRA) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan identitas, norma, nilai, dan prinsip berperan sebagai intangible forces, sedangkan praktik politik dan eksploitasi sebagai tangible forces dalam proses regionalisme di Kawasan Afrika. Regionalisme yang terjadi di Kawasan Afrika berdasarkan aspek sosial disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Melalui pendekatan regionalisme baru, diperoleh peran aktor non-negara yang turut mewarnai regionalisme kawasan. Terakhir, panggung politik global yang dinamis juga menuntut OAU untuk merubah haluan di tengah gempuran zaman.

Kata kunci: regionalisme; apartheid; new regionalism approach; Afrika; sosial budaya

Pendahuluan

Pan-Africanisme, sebuah fondasi fundamental regionalisme Afrika, mengantarkan kawasan ini pada lembaran baru. Kwane Nkrumah, Nnamdi Azikiwe, dan Julius Nyerere lah yang pertama kali memperkenalkan gagasan revolusioner tersebut di bumi

Afrika. Pan-Afrikanisme sebagai filosofi dan ideologi didefinisikan sebagai pembentuk nasionalisme di berbagai bidang interaksi manusia di kawasan. Peningkatan kesatuan Afrika dalam semua bidang interaksi manusia, baik itu politik, ekonomi, sosial, spiritual, dan budaya, dimaksudkan untuk membebaskan Afrika dari segala bentuk penjajahan bentuk lama dan baru, supremasi Barat, dan diskriminasi rasial (Abegunrin, 2009). Sementara itu, Pan-Afrikanisme juga memperoleh definisi lain, yakni sebagai gerakan politik yang mempromosikan nilai moral, norma sosial, prinsip tradisional, dan adat istiadat setempat. Dalam konteks ini, Pan-Afrikanisme yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik merupakan resistensi masyarakat Afrika yang dihadapkan pada tindak diskriminasi, opresi, hingga eksploitasi. Dengan kata lain, identitas “terjajah” menjadi pijakan utama gerakan pembebasan Afrika dalam memperjuangkan kesetaraan hingga kemerdekaan bangsanya.

Menurut sejarah, proses integrasi kawasan di Afrika telah dimulai sejak era kolonialisme bangsa Eropa di tanah mereka. Kemudian, lahir beberapa upaya dekolonisasi dari cengkraman penjajah, seperti gerakan pembebasan masyarakat Afrika sebagai perlawanan. Meskipun demikian, beberapa akademisi hubungan internasional juga berasumsi bahwa sebagian besar kemerdekaan yang diperoleh merupakan “hibah” semata dengan tidak semua wilayah jajahan melakukan resistensi terhadap penjajah (Ernest, 2020). Kini, regionalisme Afrika tidak terbatas pada tantangan neo-kolonialisme, tetapi juga terikat pada strategi ketahanan negara-negara di kawasan terhadap kerangka pembangunan dan transformasi ekonomi. Bagaimanapun, integrasi regional di Afrika mengukir catatan perjalanan panjang yang hingga kini masih layak diperbincangkan. Merujuk pada regionalisme di Afrika, dapat diasumsikan bahwa kesadaran atas pentingnya eksistensi dan hubungan intrakawasan di lingkungan internasional mendorong negara-negara untuk saling berintegrasi. Keterikatan yang dilahirkan atas kesadaran tersebut menuntut negara-negara untuk menginstitutionalkan kerja sama mereka di dalam kawasan (*region*), baik dalam bentuk kerja sama keamanan, ekonomi, atau politik. Dengan kata lain, regionalisme lahir sebagai jawaban dan harapan atas kepentingan, permasalahan, dan tantangan bersama (Akbar, 2012). Di sistem internasional yang dinamis, berbagai peristiwa yang terjadi pun mendorong regionalisme untuk mengikuti arus perkembangan. Semula, proses integrasi institusi hanya dilirik berdasarkan dorongan proses politik, isu keamanan tradisional, dan ancaman kolektif (*common enemy*) (Akbar, 2012). Namun, seiring berjalannya waktu, formula lain dirumuskan.

Region atau kawasan tidak lagi diasosiasikan dengan geografi, tetapi lebih kompleks dan multilevel, yakni ketika aktor, agensi, komunitas, geografi dan faktor lain memainkan peran masing-masing untuk membentuk regionalisme kawasan. Selaras dengan hal tersebut, tren dan kemajuan regionalisme di berbagai belahan dunia tak terlepas dari peran globalisasi. Lebih tepatnya, dekade 90-an membuka jalan bagi regionalisme baru yang didorong oleh berakhirnya perang dingin serta arus globalisasi (Baylis dkk, 2007). Di era tersebut, lahir pendekatan yang saat ini kita kenal dengan *New Regionalism Approach* (NRA). Pendekatan regionalisme baru yang terikat dengan ilmu hubungan internasional mengakui pentingnya peran aktor non-negara pada proses pembentukan regionalisme kawasan. Pendekatan ini menuntut kita untuk berpikir lebih luas terkait aktor-aktor yang bermain dalam integrasi regional. Berkontradiksi dengan pendekatan *mainstream*, *new regionalism approach* (NRA) lebih berfokus pada dinamika dan proses regionalisasi di berbagai dimensi dan tingkatan. Menurut Grant dan Soderbaum, pendekatan

regionalisme baru berporos pada heterogenitas, multidimensi, *outward looking*, dan konstruksi tiap aktor (Soderbaum & Shaw, 2003). Namun, NRA juga tetap berasosiasi dengan pendekatan regionalisme lama. Secara singkat, pendekatan regionalisme baru menyediakan kacamata yang mampu menganalisis proses integrasi kawasan secara holistik.

Penulis percaya bahwa pendekatan regionalisme baru sangat relevan dengan konteks regionalisme dimensi sosial budaya di Kawasan Afrika. Disebabkan oleh penekanan *ideational forces* pada NRA, penulis akan menjabarkan bagaimana konstruksi identitas, budaya, norma, dan nilai kolektif yang multilevel dan multiaktor dapat mempengaruhi input dalam proses pembentukan regionalisme di Kawasan Afrika. Diawali dengan kesamaan identitas sebagai “bangsa yang terjajah” melalui serangkaian tindakan represi yang dilakukan para kolonialis, lahirnya gerakan Pan Afrikanisme, hingga institusionalisasi integrasi kawasan melalui Organization African Unity (OAU) maupun African Union (AU). Di tulisan kali ini, penulis akan menganalisis beberapa literatur artikel berita *online*. Artikel-artikel tersebut di antaranya, “*Life under apartheid: demeaning, often brutal*” yang ditulis oleh Michael Pearson and Tom Cohen CNN, “*African Union Celebrates 60th Anniversary in Addis Ababa*” oleh Editorial Team VOA News, dan “*Is the African Union fulfilling its mandate?*” oleh Hamza Mohamed, Aljazeera.

Argumentasi

Studi Kasus

a. *Life under apartheid: demeaning, often brutal*

Pada bulan November tahun 1990, Ellen Moshweu hanya berusaha pergi ke gereja, tetapi berakhir dengan tragis, seorang polisi menembaknya dari belakang. Kenyataan ini menggambarkan masa apartheid. Sejarah kelim Afrika tersebut terlalu kabur untuk diingat bagi banyak anak muda. Apartheid merupakan sistem segregasi paksa antar ras dan kelas sosial yang pantas untuk dikutuk dan ditinggalkan. Hingga pada akhirnya, seorang pembawa perubahan hadir, Nelson Mandela, ia memelopori gerakan yang melawan penindasan, aturan kerja yang tidak masuk akal dan memalukan, pemindahan paksa, dan perlakuan seenaknya dari pihak yang berwenang (Michael & Tom, 2013).

Sejarah Apartheid

Sejarah apartheid dimulai setelah Perang Dunia II, meskipun orang Eropa kulit putih telah lama berkuasa di Afrika Selatan. Partai Nasional negara itu, yang dipimpin oleh keturunan pemukim Eropa yang disebut Afrikaner, menghadirkannya setelah berhasil memenangkan pemilihan dengan kampanye yang menuntut kontrol rasial yang lebih ketat menghadapi arus besar orang kulit hitam ke kota-kota Afrika Selatan. Hingga saat ini, antara tahun 1949 dan 1953 undang-undang yang semakin represif disahkan, seperti larangan pernikahan orang kulit putih dan kulit hitam, pemberian fasilitas publik hanya pada orang kulit putih, pendidikan terbaik hanya untuk anak kulit putih, serta pembagian tanah tandus dan kumuh hanya untuk orang kulit hitam. Tidak hanya itu, dibuat juga sistem pengawasan perjalanan dan kartu identitas yang mengontrol pergerakan dan pekerjaan orang kulit hitam. Dengan kata lain, apartheid mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 1950-an, perlawanan sipil mulai menggema di beberapa penjurus negeri. Misalnya, kampanye perlawanan di tahun 1952 yang diikuti oleh ribuan orang kulit hitam berharap memperoleh penghidupan yang lebih baik. Ribuan orang ditangkap, tetapi Kongres Nasional Afrika, yang mengorganisir kampanye tersebut, terpaksa menghentikannya setelah banyak orang terluka oleh polisi. Namun, situasinya seketika berubah ketika polisi Afrika Selatan membunuh 69 pengunjuk rasa yang melakukan protes non-kekerasan di luar kantor polisi Sharpeville. Aksi brutal kepolisian tersebut melahirkan kecaman dari publik internasional sekaligus menabuh genderang perang bagi para pejuang bersenjata di Afrika Selatan. Baru pada tahun 90-an, Nelson Mandela “menghirup udara segar,” empat tahun sebelum dia menjadi presiden.

b. African Union Celebrates 60th Anniversary in Addis Ababa

Delegasi dari berbagai benua Afrika berkumpul di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, pada hari Kamis, 21 Juni 2023 untuk merayakan ulang tahun ke-60 berdirinya Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), yang kemudian menjadi Uni Afrika (UA). Dalam sebuah pernyataan, Uni Afrika menyatakan bahwa upacara peringatan ini, yang diadakan di markas Uni Afrika di Addis Ababa, mengenang tanggal 25 Mei 1963, saat kepala negara dari 32 negara Afrika merdeka berkumpul di kota tersebut untuk menandatangani piagam pendirian OAU, yang dianggap sebagai institusi benua pertama setelah periode kemerdekaan (Voa News, 2023).

Dalam piagamnya, OAU menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menghapuskan sisa-sisa kolonialisme dan apartheid di benua ini, mempromosikan persatuan dan solidaritas antara negara-negara Afrika, mengoordinasikan kerjasama untuk pembangunan, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara anggota, serta mempromosikan kerjasama internasional. Pada tahun 1999, pemimpin-pemimpin OAU yang bertemu di Libya sepakat untuk memfokuskan kembali tujuan organisasi ini dengan lebih intens dalam kerjasama dan integrasi negara-negara Afrika guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi benua ini. Mereka mengeluarkan deklarasi yang menyerukan pendirian Uni Afrika, yang resmi diluncurkan pada tahun 2002.

Dalam sambutan pembukaannya kepada para delegasi, Ketua Komisi Uni Afrika, H.E. Moussa Faki Mahamat, menyebut hari ini sebagai hari penting dalam sejarah Afrika karena menghormati para pendiri organisasi ini yang telah membentuk landasan bagi "kebangkitan Afrika dan perkembangan sosial-ekonomi dan politiknya." Namun, Mahamat, yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Chad, juga memperingatkan tentang campur tangan kekuatan dunia dalam urusan Afrika, dan menyebutnya sebagai "perjuangan hegemonik antara kekuatan besar" yang sedang berlangsung di tingkat internasional. Mahamat menegaskan bahwa hal ini mengancam membuat Afrika menjadi medan perang dalam "versi baru Perang Dingin", yang dapat mengakibatkan kerugian bagi benua ini. Meskipun ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, peringatan ini menunjukkan pentingnya menjaga kedaulatan dan kepentingan Afrika di tengah dinamika politik global. Perayaan ulang tahun ini menjadi momen yang penting bagi Uni Afrika dan negara-negara Afrika, menegaskan komitmen mereka terhadap persatuan, pembangunan, dan perjuangan menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh benua.

c. Is the African Union fulfilling its mandate?

Pemimpin-pemimpin Uni Afrika sedang menghadiri pertemuan tahunan mereka di Addis Ababa. Organisasi ini, yang terdiri dari 55 negara anggota, didirikan pada tahun 2001 untuk menggantikan Organisasi Persatuan Afrika yang bertujuan mengakhiri kolonialisme di Afrika. Uni Afrika berkomitmen untuk memberikan solusi-solusi bagi masalah-masalah Afrika. Namun, keberhasilan organisasi ini masih menjadi pertanyaan (Hamza Mohammed, 2019). Dalam hal demokrasi, Uni Afrika bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, beberapa kejadian mempertanyakan keefektifan mereka. Pada tahun 2018, ketika hasil pemilihan di Republik Demokratik Kongo dipertentangkan, Uni Afrika tidak dapat berbuat banyak. Keputusan pengadilan menetapkan Felix Tshisekedi sebagai pemenang, meskipun Uni Afrika meragukan hasilnya. Beberapa pemimpin di Afrika juga menghilangkan batasan masa jabatan mereka, menciptakan ketidakstabilan demokrasi. Korupsi menjadi masalah serius di Afrika. Setiap tahun, lebih dari \$140 miliar hilang akibat korupsi, setara dengan seperempat dari PDB rata-rata benua.

Uni Afrika menyatakan komitmennya dalam memberantas korupsi, tetapi masih banyak negara di Afrika yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Uni Afrika telah menetapkan tema melawan korupsi dalam pertemuan puncak mereka, namun tantangan tersebut masih belum terselesaikan. Keamanan tetap menjadi tantangan di Afrika, dengan konflik yang mempengaruhi banyak negara di benua ini. Uni Afrika membentuk Pasukan Standby Afrika untuk menjaga perdamaian di masa krisis. Namun, Uni Afrika masih tergantung pada bantuan dan dukungan dari negara-negara luar untuk membiayai operasional pasukan ini. Uni Afrika telah mencapai kesuksesan relatif dalam menciptakan Kawasan Perdagangan Bebas Kontinental. Hingga saat ini, 19 negara telah menandatangani perjanjian tersebut. Namun, kesepakatan ini masih membutuhkan tanda tangan setidaknya 22 negara untuk berlaku sepenuhnya. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan kemajuan dalam integrasi ekonomi di Afrika. Masalah pelecehan seksual juga muncul di lingkungan kerja Uni Afrika. Penyelidikan internal menemukan bahwa magang, relawan muda, dan staf jangka pendek dieksploitasi secara seksual sebagai imbalan pekerjaan. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dan peningkatan perlindungan hak perempuan di dalam organisasi.

Analisis Studi Kasus

Mengacu pada studi kasus artikel berita di atas, terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan diangkat oleh penulis dalam menganalisis. Pertama, terkait bagaimana Apartheid melahirkan gairah dan semangat untuk berintegrasi. Kedua, hubungan keterkaitan antara regionalisme, norma, dan identitas di Afrika. Ketiga, aktualisasi gerakan pan-Afrikanisme ke dalam Organization African Unity (OAU) yang kemudian bertransformasi menjadi African Union (AU).

Apartheid: Titik Balik Perlawanan Pribumi

“apartheid, (Afrikaans: “apartness”) policy that governed relations between South Africa’s white minority and nonwhite majority for much of the latter half of the 20th century, sanctioning racial segregation and political and economic discrimination against nonwhites (Britannica, 2023).

Apartheid erat kaitannya dengan segregasi dan diskriminasi antara ras kulit putih dengan kulit hitam di Afrika. Sistem politik ini merupakan dampak kolonialisme yang dilakukan bangsa Eropa kala itu. Ras kulit putih ditempatkan pada kasta teratas kehidupan sosial masyarakat dan diidentikan sebagai golongan “superior” (Benjamin, 1993). Sebagaimana yang telah dipaparkan pada studi kasus, UU represif yang ditujukan untuk melegalisasi praktik diskriminatif ini disahkan antara tahun 1949–1953 (Hopkinson, 1964). Dengan validitas hukum yang sah, kehidupan di Afrika “bak neraka” dengan sistem pemisahan kelas, yakni kelas pertama diduduki oleh ras kulit putih, kelas kedua oleh kulit berwarna, kelas ketiga oleh bangsa Asia, dan kelas terendah ditempati oleh ras kulit hitam.

Diskriminasi yang melembaga ini kemudian mengatur tata letak pemukiman bagi ras kulit hitam (*Bantustan*) yang merupakan daerah kumuh di Afrika (Benjamin, 1993). Adapun alasan pengelompokan tempat tinggal berdasarkan ras ini disinyalir sebagai strategi para penjajah agar dapat terus mengamankan kursi kediktatorannya sekaligus memecah belah persatuan Afrika. tidak hanya mengatur persoalan tempat tinggal, tetapi juga ruang-ruang kehidupan yang lain, di antaranya masalah pekerjaan, izin perjalanan, perkawinan, hingga cara pemenuhan kehidupan ras kulit hitam. Hanya sedikit dari warga pribumi Afrika yang mengecap bangku pendidikan dan tidak berakhir menjadi gelandangan. Bagaimanapun, Apartheid telah membangkitkan semangat dan amarah pribumi Afrika yang dibuktikan dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan supremasi kulit putih dan penjajah di negerinya. Diawali dengan gerakan resistensi lokal yang secara mandiri dilakukan oleh penduduk. Kemudian, gerakan perlawanan ini semakin meluas hingga memperoleh dukungan dunia internasional. Pada 21 Maret 1960, Pan Africanist (PAC) bersama African National Congress (ANC) melakukan perlawanan terbuka di Nashville (Victory, 2011). Namun, puluhan korban jiwa dari kubu pribumi Afrika gugur akibat bentrok yang tidak terhindarkan selama demonstrasi berlangsung.

Gairah untuk melawan praktik rasis yang merenggut hak-hak ras kulit hitam Afrika ini, mengarah pada upaya penyatuan kawasan. Disebabkan atas identitas, nasib, dan kepentingan yang sama, keinginan untuk saling berintegrasi pun muncul beriringan. Belenggu apartheid di Afrika—khususnya Afrika Selatan—menjadi titik balik resistensi pribumi yang bersandar pada asas kesetaraan dan hak asasi manusia. Dorongan *intangible* (kultur, norma, dan identitas) sebagai “bangsa Afrika yang terjajah dan terdiskriminasi” maupun dorongan *tangible* praktik politik dan eksploitasi yang terus menerus menggeser kedudukan pribumi menjadi pemersatu di antara mereka. Kegigihan untuk memperoleh kebebasan ini akan menjadi cikal bakal lahirnya pan-Africanisme, Organization African Unity (OAU) African Union (AU), dan African Union. Selengkapnya, penulis mengklasifikasikan faktor-faktor pendorong integrasi kawasan sebagai berikut

| <i>Tangible Forces</i> | <i>Intangible Forces</i> |
|---|---|
| Praktik politik apartheid yang menjadi titik awal diskriminasi bangsa kulit hitam di Afrika; Eksploitasi sumber daya alam dan manusia; African Liberation Movement. | Nilai dan prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan untuk setiap individu; semangat pembebasan Afrika; gagasan yang mengkritik “ <i>white man’s burden</i> ”. |

Kedua klasifikasi faktor pendorong di atas saling berinteraksi satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Misalnya, gagasan “*white man’s burden*”, sistem politik apartheid, dan eksploitasi sumber daya alam maupun manusia menyebabkan timbulnya resistensi dalam masyarakat Afrika. Homogenisasi yang dibawa oleh praktik kolonialisme tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Afrika Selatan yang sadar akan eksploitasi kekayaan maupun ketidaksetaraan yang dilegalkan oleh bangsa Eropa. Merujuk pada pernyataan Phumelele Stone Sizani, seorang anggota partai Africa National Congress dan mantan parlemen Afrika tahun 2016, eksploitasi warisan budaya, tanah, dan sumber daya alam yang selama berabad-abad menjadi penopang hidup bangsa Afrika memberi kesempatan untuk memahami asal-usul, identitas, dan pentingnya koherensi sosial dan pembangunan bangsa (People Assembly, 2009).

Regionalisme, Norma, dan Identitas Afrika

Proses regionalisme dimensi sosial budaya Kawasan Afrika dapat dianalisis dengan berbagai pendekatan. Penulis memilih untuk menggunakan *new regionalism approach* (NRA) sebagai alat penguraian dimensi sosial budaya. Selama masa pergolakan, Kawasan Afrika sadar akan identitas mereka sebagai bangsa Afrika yang telah melalui serangkaian peristiwa pahit dalam hidup. Lahirnya resistensi lokal (*bottom up*) yang diinisiasi oleh berbagai kelompok kepentingan, seperti Pan Africanist (PAC) dan African National Congress (ANC), serta sosok Nelson Mandela, mengawal Afrika ke kehidupan yang jauh lebih baik.

Norma kesetaraan (*equality*), kebebasan (*liberty*), dan nilai-nilai kemanusiaan lain yang terinternalisasi dalam gerakan pan-Afrikanisme menjadi semacam arahan bagi kawasan untuk terintegrasi (Victory, 2011). Paradigma regionalisme baru yang berafiliasi dengan konstruktivisme menegaskan bahwa identitas, kepentingan, norma, dan nilai kolektif dalam pan-Afrikanisme disebarkan bukan hanya oleh aktor negara saja, melainkan juga aktor non-negara dan aktor transnasional. Salah satu interaksi yang membuktikan keterlibatan aktor nonnegara utamanya adalah melalui *social movement*, seperti African Liberation Movement sebagai manifestasi awal dari Pan-Afrikanisme. Gerakan politik tersebut menyebar dengan cepat seiring dengan bertambah kompleksnya permasalahan domestik yang terjadi karena sistem yang diskriminatif. Mengacu pada studi Scott, gerakan sosial merupakan bentuk perlawanan kolektif oleh kelompok dengan kepentingan serupa dan komitmen terhadap solidaritas (Hollander & Einwohner, 2004). Perlawanan bangsa Afrika timbul sebagai hasil interaksi intens antara elit atau tokoh penting, kekuatan oposisi, dan pihak berwenang, di antaranya Nelson Mandela, Kwane Nkrumah, Nnamdi Azikiwe, Julius Nyere, dan lain sebagainya. Sistem politik Apartheid yang merampas hak-hal dasar bangsa Afrika menimbulkan pertentangan di domestik kawasan. Di sisi lain, nilai kolektif dalam Pan-

Afrikanisme tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Afrika di dalam negeri saja, tetapi juga untuk diaspora dan masyarakat internasional.

Jika ditelaah lebih jauh, integrasi kawasan Afrika juga diperkuat oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal proses regionalisme Afrika merujuk pada dinamika kawasan akibat praktik kolonialisme dan sistem politik *Apartheid*. Kenyataan yang terjadi di domestik Afrika, seperti diskriminasi rasial yang berujung pada penderitaan berkepanjangan bermuara pada gerakan resistensi masyarakat di berbagai penjuru negeri (Benjamin, 1993). Sementara itu, faktor eksternal merujuk pada penetrasi nilai dan norma universal yang dibawa oleh arus globalisasi. Sebenarnya, berita kemerdekaan negara-negara Asia dan paham-paham universal, seperti hak asasi manusia yang dibawa oleh arus globalisasi secara tidak langsung juga ikut andil dalam regionalisme kawasan Afrika. Sebenarnya, bangsa barat lah yang pertama kali dan antusias dalam mengglorifikasi isu hak asasi manusia. Hingga PBB akhirnya mengesahkan Deklarasi Universal HAM pada 1948. Dalam hal ini, PBB sebagai organisasi internasional (aktor) mensosialisasikan nilai-nilai HAM untuk diadopsi oleh semua negara di dunia. Ditambah, pasca tragedi Sharpeville 21 Maret 1960 yang menewaskan 69 pengunjuk rasa, PBB dan publik internasional mengecam keras tindakan represif dan diskriminatif yang masih berlangsung di Afrika Selatan dan Afrika bagian lain (Victory, 2011). Dengan demikian, gerakan Pan Afrikanisme sebenarnya mengadopsi dan menginternalisasi nilai, norma, dan prinsip universal yang dibawa oleh bangsa-bangsa besar di dunia.

Manifestasi Gerakan pan-Afrikanisme dalam Regionalisme Afrika

Secara garis besar, regionalisme Kawasan Afrika mampu terbentuk setelah melewati perjalanan panjang. Diawali dengan upaya perlawanan kolonialisme dan imperialisme, pribumi Afrika sadar akan pentingnya kebebasan dalam menentukan nasib sebagai manusia merdeka. Selain itu, dominasi ras kulit putih di Afrika selama bertahun-tahun menjerumuskan kawasan—yang terkenal dengan berlian ini—ke dalam lembah kemiskinan. Tidak hanya bersandar pada persamaan identitas sebagai “bangsa yang terjajah” dan “bangsa” yang dipermalukan” oleh praktik apartheid saja, tetapi juga identitas “*weak state*” atau “*fail state*”. Identitas yang turut melekat pada citra mayoritas negara di Afrika tersebut timbul akibat kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya pada rakyat. Bukan tanpa alasan, konflik yang terus berkecamuk tiada habis, sejarah kolonialisme dan eksploitasi yang keruh, pendidikan yang rendah akibat praktik apartheid, dan penyebab lain turut melanggengkan kemiskinan di kawasan.

Pada 25 Mei 1963, Organization of African Unity (OAU) lahir sebagai manifestasi gerakan pan-Afrikanisme yang telah lama diperjuangkan (Voa News, 2023). Tujuan pembentukan OAU, bagaimanapun, adalah melembagakan integrasi kawasan secara formal untuk melanjutkan cita-cita dan harapan pan-Afrikanisme. Selain itu, OAU dibentuk dengan tujuan yang lebih besar, yakni untuk menyatukan negara-negara di Afrika di bawah suatu kerangka kerja sama. Merujuk pada studi kasus, solidaritas di atas identitas kolektif telah berhasil melahirkan komitmen terkait upaya penghapusan sisa-sisa kolonialisme dan apartheid, pemeliharaan kedaulatan dan integritas negara-negara di kawasan, serta pemerolehan rekognisi dunia internasional. Dengan kata lain, regionalisme Afrika yang terinstitusional kan tercapai untuk pertama kalinya pada era ini. Institusi regional Afrika OAU kemudian bertransformasi

menjadi African Union pada pertengahan tahun 2002 (Voa News, 2023). Keputusan tersebut disepakati dan terkodifikasi dalam Undang-Undang Konstitutif yang secara langsung menggeser arah perjuangan negara-negara Afrika. Sebelumnya, didasarkan atas kesamaan identitas, kepentingan, norma, dan nilai yang terkonstruksi, poros gerakan negara-negara anggota terletak pada pembebasan belenggu kolonialisme dan apartheid. Namun, arah gerak institusi baru—AU—ini jauh lebih kompleks mengikuti perkembangan zaman dan arus globalisasi. African Unity berupaya untuk mengubah identitas “*weak state*” atau “*fail state*” yang melekat pada negara-negara anggotanya melalui kerja sama ekonomi yang intensif.

Mengacu pada pemikiran empiris Thabo Mbeki, Presiden Afrika Selatan 1999-2008, bahwa diperlukan pembaharuan tafsir “harga diri” Afrika, yang sebelumnya berorientasi pada pembebasan sistem diskriminatif, sekarang mengarah pada perkembangan ekonomi dan politik kawasan. Pernyataan tersebut relevan dengan gagasan Nkrumah, Presiden Ghana 1909-1972, yang menegaskan bahwa masyarakat Afrika memerlukan pengikat (*federal union*) yang dapat bertindak asertif di panggung global dengan berpegang teguh pada prinsip kesetaraan (*equality*) (Babatunde, 2022). Dengan demikian, berdasarkan aspek sosial, keputusan untuk mengubah arah juang Organization of African unity (OAU) tetap berlandaskan pada kolektivitas identitas, nilai, norma, dan prinsip di antara negara-negara anggota. Meskipun terdapat perbedaan budaya, bahasa, dan sejarah di antara negara-negara anggota, AU telah berusaha membangun solidaritas dan persatuan di antara mereka karena kenyataannya organisasi ini masih menghadapi banyak tantangan dalam mencapai tujuannya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi demokrasi yang lemah, korupsi yang merajalela, keamanan yang rapuh, ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan perlindungan yang kurang terhadap pelecehan seksual (Hamza Mohamed, 2019). Meskipun demikian, kemajuan dalam integrasi ekonomi dan beberapa upaya dalam melawan korupsi menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.

Kesimpulan

Supremasi ras kulit putih melalui praktik apartheid yang mengakar di Afrika telah memupuk amarah pribumi. Perlahan-lahan, gerakan resistensi kelokalan mulai muncul ke permukaan pun diwarnai dengan kehadiran aktor-aktor di berbagai level, seperti domestik (kelompok kepentingan) hingga individual—layaknya Nelson Mandela. Berdasarkan aspek sosial, perjuangan rakyat Afrika berfondasi pada konstruksi identitas dari para kolonialis dan pelaku sistem apartheid. Begitupun dengan norma, nilai, dan prinsip yang terbentuk bukan hanya dari dalam, melainkan memperoleh penetrasi dari luar akibat arus globalisasi—nilai-nilai universal hak asasi manusia contohnya. Selain itu, agen transnasional lain pun turut ikut andil dalam upaya pembebasan belenggu ras kulit putih di Afrika, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional yang mengecam segala perbuatan keji hasil segregasi apartheid. Lebih lanjut, regionalisme di Kawasan Afrika menemui titik terang (*moment of truth*) ketika gerakan pan-Afrikanisme berhasil terlembagakan melalui Organization of African Unity di tahun 1963. Meskipun begitu, Kawasan Afrika terus melakukan evaluasi di tengah iklim politik global yang dinamis. Hingga pada akhirnya, di awal tahun 2000-an OAU bertransformasi menjadi African Union (AU) yang sekaligus menandai pergeseran arah gerak OAU yang lebih kompleks, yakni tidak lagi berporos pada pembebasan kolonialisme dan apartheid saja, tetapi juga berusaha

menjawab tantangan zaman. Walaupun keefektifan AU semakin dipertanyakan, setidaknya institusi ini telah membawa Afrika pada abad baru yang lebih cerah.

Referensi

BUKU

- Baylis, dkk. 2007. *The Globalization of World Politics : an Introduction to International Relations*. 4th ed. New York: Oxford University Press.
- Söderbaum Fredrik & Shaw T. M. (2003). *Theories of new regionalism : a palgrave reader*. Palgrave Macmillan.
- Hopkinson, Tom. 1964. *Apartheid In Action dalam History of south Africa*. Life world Library South Africa.
- Benjamin Poground, 1993, *Mereka Yang Berjasa Bagi Dunia: Nelson Mandela: Pemimpin Afrika Selatan Yang Dipenjara Selama Dua Puluh Tujuh Tahun Karena Berjuang Menentang Apartheid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 9-10

JURNAL

- Abegunrin, O. (2009). *Africa in Global Politics in the Twenty-First century: A Pan-African Perspective*. New York: Palgrave Macmillan Press.
- Akbar, Dimas. "Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional." *Indonesian Journal of International Law*, vol. 9, no. 3, 2012, pp. 510-512, doi:[10.17304/ijil.vol9.3.415](https://doi.org/10.17304/ijil.vol9.3.415).
- Ernest Tooche Aniche (2020): From Pan-Africanism to African regionalism: A chronicle, *African Studies*, DOI: 10.1080/00020184.2020.1740974
- Hollander, J. A., & Einwohner, R. L. (2004). Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, 19 (4).
- Victory Pradhitama, "Menggali Keadilan untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatan", *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, Vol. 1, No.1, Tahun 2011, hlm 29.

WEBSITE

- Babatunde Fagbayibo, "Pan-African integration has made progress but needs a change of mindset"<https://theconversation.com/pan-african-integration-has-made-progress-but-needs-a-change-of-mindset-183541>(diakses pada 20 Juni 2023, pukul 18,10)
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023, Juni 8). apartheid. Encyclopedia Britannica.
<https://www.britannica.com/topic/apartheid>
- Editorial Team VOA News, "African Union Celebrates 60th Anniversary in Addis Ababa" <https://www.voanews.com/a/african-union-celebrates-60th-anniversary-in-addis-aba-ba-/7109047.html> (diakses pada 20 Juni 2023, pukul 12.40)
- Hamza Mohamed, "Is the African Union fulfilling its mandate?"<https://www.aljazeera.com/news/2019/2/10/is-the-african-union-fulfilling-its-mandate> (diakses pada 20 Juni 2023, pukul 13.43)
- Michael Pearson dan Tom Cohen, "Life under apartheid: demeaning, often brutal" <https://edition.cnn.com/2013/12/06/world/africa/mandela-life-under-apartheid/index.html> (diakses pada 20 Juni 2023, pukul 12.30)
- People Assembly, "People's Assembly. View Section: Celebrating Our Tangible And Intangible Cultural Heritage For Social Cohesion (Debate On

Heritage Day)” <https://www.pa.org.za/hansard/2009/september/17/proceedings-of-the-national-assembly-thursday-17-2/celebrating-our-tangible-and-intangible-cultural-heritage-day> (diakses pada 17 September 2009).